

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes/BUMDesma diberikan kewenangan untuk membentuk unit usaha, BUMDes/BUMDesma dapat membentuk lebih dari satu unit usaha dibawahnya dengan memperhatikan potensi desa. Permasalahan yang terjadi adalah unit-unit usaha dibawah BUMDes/BUMDesma tersebut mendapatkan keuntungan dan kerugian yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga berpotensi untuk melakukan perjanjian utang piutang satu sama lain. Mengingat hal tersebut tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma melakukan perjanjian utang piutang yang menimbulkan adanya prestasi antar unit usaha. Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian utang piutang antar unit usaha dalam satu BUMDes/BUMDesma serta bagaimana kedudukan BUMDes/BUMDesma pada perjanjian utang piutang yang dilakukan antar unit usaha didalamnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan status badan hukum pada unit usaha BUMDes/BUMDesma mempengaruhi jenis dan bentuk hubungan hukum yang terjalin, termasuk tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Begitu juga dengan kedudukan BUMDes/BUMDesma dalam perjanjian antar unit usaha didalamnya, status badan hukum yang dimilikinya berperan penting dalam pengelolaan unit-unit usaha khususnya dalam hal perlindungan tanggung jawab hukum dan keuangan.

Kata Kunci : Perjanjian, Badan Usaha Milik Desa, Unit Usaha

ABSTRACT

In carrying out business activities, BUMDes/BUMDesma is given the authority to establish business units. BUMDes/BUMDesma can establish more than one business unit under its auspices, taking into account the potential of the village. The problem that arises is that the business units under the BUMDes/BUMDesma experience different profits and losses in their business activities, which has the potential to lead to agreements among them. Considering that there is no legislation regulating if business units within a BUMDes/BUMDesma enter into agreements that result in performance between business units. Based on the above issues, the problem formulation is determined, namely how the legal relationship of the parties in the agreement between business units within one BUMDes/BUMDesma and how the position of BUMDes/BUMDesma in the agreements made between the business units within it.

The research method used is normative research. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach.

The research results show that the difference in legal status of BUMDes/BUMDesma business units affects the type and form of legal relationships that are established, including the responsibilities and rights held by each party. Similarly, the position of BUMDes/BUMDesma in inter-unit business agreements, the legal status it possesses plays an important role in the management of business units, especially in terms of legal and financial liability protection.

Keywords: Agreement, Village-Owned Enterprises, Business Unit